

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan suatu perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan diukur dari berbagai hal, salah satunya yaitu dengan mengukur ketersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Manusia merupakan potensi dan kekayaan yang dimiliki dari suatu negara, oleh karena itu manusia harus selalu menjadi target pembangunan dari suatu negara. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadikan potensi bagi pembangunan suatu negara, namun sebaliknya jika sumber daya manusia di suatu negara kurang berkualitas maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan di suatu negara tersebut (Todaro, 2006).

Pembangunan dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, karena kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan. Kesejahteraan yang dimaksudkan antara lain: masyarakat dapat menikmati umur panjang, sehat, mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki kemampuan produksi yang optimal. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan, bukan merupakan alat dari proses pembangunan itu sendiri. Keberhasilan proses pembangunan manusia dapat terlihat dengan keberhasilan suatu negara mengatasi permasalahan-permasalahan mendasar

di negaranya, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf dan gizi buruk (Kacaribu, 2013).

United Nations Development Programme (UNDP) sebuah lembaga yang berwenang untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan proses memperluas pilihan-pilihan penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan juga perekonomian yang semakin baik. Keberhasilan suatu pembangunan dapat diukur menggunakan berbagai parameter, antara lain yang sedang populer saat ini adalah dengan menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UNDP,1995).

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) adalah salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM). Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh Amartya Sen dan Manhub ul Haq dan dibantu oleh Gustav Ranis dan Lord Meghnan Desai. Sejak saat itu IPM digunakan oleh UNDP sebagai pengukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan ekonomi. Sebagian negara di dunia, baik negara maju ataupun negara berkembang menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mengukur kualitas sumber daya manusianya (UNDP,1995).

Yusri (2010) menyatakan bahwa ada tiga alasan pembangunan manusia yang perlu diperhatikan, dikarenakan pertama, banyak negara berkembang

(termasuk Indonesia) berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi gagal mengurangi masalah kesenjangan sosial, ekonomi dan juga kemiskinan yang terus terjadi. Kedua, banyak negara maju yang berpendapatan tinggi masih belum mampu mengatasi masalah-masalah sosial seperti narkoba, alkohol, AIDS, gelandangan, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketiga, sementara beberapa negara yang masih berpendapatan rendah mampu mencapai pembangunan manusia yang tinggi, jika negara tersebut dapat menggunakan secara bijaksana semua sumber daya yang ada, untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

Untuk mengukur ketiga pilihan tersebut UNDP menyusun IPM yang merupakan ukuran perbandingan tiga dimensi tentang pembangunan manusia. Pertama yaitu, panjang umur dan kesehatan, yang diukur menggunakan angka harapan hidup saat lahir. Kedua, pendidikan diukur menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Ketiga, standar hidup atau biasa disebut ekonomi yang diukur menggunakan paritas daya beli (PPP) atau penghasilan. Ketiga dimensi tersebut sangat penting untuk menentukan tingkat kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kualitas SDM. Ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, misalnya pertumbuhan ekonomi, kebijakan negara dan lain-lain. Jadi IPM suatu negara dapat meningkat jika ketiga unsur itu dapat ditingkatkan, karena nilai IPM itu sendiri menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara.

Menurut Tambunan yang dikutip dalam Kacaribu (2013) dengan kata lain, menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. IPM memang bukanlah ukuran menyeluruh tentang pembangunan manusia, tetapi indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (Irawan, 2009).

Modal manusia (*human capital*) adalah salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dengan modal manusia yang berkualitas akan membuat kinerja ekonomi menjadi lebih baik. Kualitas modal manusia ini dilihat dari aspek tingkat kesehatan, pendidikan dan kemiskinan. Jadi untuk memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan pembangunan manusia, selain itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM itu sendiri (Yusri, 2010).

IPM sendiri dapat digunakan menjadi salah satu tolak ukur apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang. Selain itu IPM juga dapat digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengembangkan konsep pembangunan manusia dan menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0-100 poin dengan kategori sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi: IPM lebih dari 80,0 poin
2. Tinggi: IPM antara 70,0 – 79,9 poin
3. Sedang: IPM antara 55,0 – 69,9 poin
4. Rendah: IPM kurang dari 55,0 poin

Tabel 1.1

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Negara- negara ASEAN, Tahun 2015

No.	Negara	Skor IPM	Peringkat	Perubahan peringkat IPM	Rata-rata Pertumbuhan Tahunan (%)	Kelompok
1	Singapura	92,5	5	0	1,02	Sangat tinggi
2	Brunei Darussalam	86,5	30	1	0,40	Sangat tinggi
3	Malaysia	78,9	59	1	0,83	Tinggi
4	Thailand	74	87	4	1,02	Tinggi
5	Indonesia	68,9	113	3	1,07	Sedang
6	Vietnam	68,3	115	2	1,45	Sedang
7	Filipina	68,2	116	-7	0,61	Sedang
8	Laos	58,6	138	5	1,57	Sedang
9	Kamboja	56,3	143	1	1,84	Sedang
10	Myanmar	55,6	145	2	1,83	Sedang

Sumber: UNDP, Tahun 2015

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Negara Singapura Menduduki Peringkat Pertama di ASEAN dengan skor IPM 92,5, diikuti oleh Brunei Darussalam dengan skor IPM 86,5, Malaysia dengan skor IPM 78,9, Thailand dengan skor IPM 74, Indonesia dengan skor IPM 68,9, Vietnam dengan skor IPM 68,3, Filipina dengan skor IPM 68,2, Laos dengan

skor IPM 58,6, Kamboja dengan skor IPM 56,3, sedangkan Myanmar menduduki peringkat terakhir dengan skor IPM 55,6.

Pernyataan UNDP baru-baru ini mengabarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk 2015 adalah 68,9 hal ini menempatkan posisi Indonesia dalam Pembangunan Manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah. Nilai IPM meningkat 30,5 persen dari nilai pada tahun 1990, hal ini menggambarkan kemajuan yang telah di capai Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di suatu daerah. Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah, maka hasil pembangunan manusia oleh pemerintah semakin berhasil yang menjadi kunci pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 1.2
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2012-2016

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	67.81	68.30	68.81	69.45	70,00
Sumatera Utara	67.74	68.36	68.87	69.51	70,00
Sumatera Barat	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73
Riau	69.15	69.91	70.33	70.84	71.20
Jambi	66.94	67.76	68.24	68.89	69.62
Sumatera Selatan	65.79	66.16	66.75	67.46	68.24
Bengkulu	66.61	67.50	68.06	68.59	69.33
Lampung	64.87	65.73	66.42	66.95	67.65
Kep. Bangka Belitung	67.21	67.92	68.27	69.05	69.55
Kep. Riau	72.36	73.02	73.40	73.75	73.99
DKI Jakarta	77.53	78.08	78.39	78.99	79.60
Jawa Barat	67.32	68.25	68.80	69.50	70.05
Jawa Tengah	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98
DI. Yogyakarta	76.15	76.44	76.81	77.59	78.38
Jawa Timur	66.74	67.55	68.14	68.95	69.74
Banten	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96
Bali	71.62	72.09	72.48	73.27	73.65
Nusa Tenggara Barat	62.98	63.76	64.31	65.19	65.81
Nusa Tenggara Timur	60.81	61.68	62.26	62.67	63.13
Kalimantan Barat	63.41	64.30	64.89	65.59	65.88
Kalimantan Tengah	66.66	67.41	67.77	68.53	69.13
Kalimantan Selatan	66.68	67.17	67.63	68.38	69.05
Kalimantan Timur	72.62	73.21	73.82	74.17	74.59
Kalimantan Utara	-	67.99	68.64	68.76	69.20
Sulawesi Utara	69.04	69.49	69.96	70.39	71.05
Sulawesi Tengah	65	65.79	66.43	66.76	67.47
Sulawesi Selatan	67.26	67.92	68.49	69.15	69.76
Sulawesi Tenggara	67.07	67.55	68.07	68.75	69.31
Gorontalo	64.16	64.70	65.17	65.86	66.29
Sulawesi Barat	61.01	61.53	62.24	62.96	63.60
Maluku	65.43	66.09	66.74	67.05	67.60
Maluku Utara	63.93	64.78	65.18	65.91	66.63
Papua Barat	60.30	60.91	61.28	61.73	62.21
Papua	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa keseluruhan IPM provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin tinggi mutu sumber daya manusia di Indonesia. Dari tabel diatas, pada tahun 2016 Provinsi Aceh memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,00 %, dimana angka tersebut masih terbilang tinggi dibandingkan Provinsi-provinsi lainnya di Indonesia terutama pada Provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

Tabel 1.3
IPM Provinsi Aceh Tahun 2012-2016

PROVINSI	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	67.81	68.30	68.81	69.45	70

Sumber: Badan Pusat Statistik, IPM Provinsi dan Nasional 2010-2016

Dari tabel 1.3 di atas, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh pada tahun 2012 yaitu 67,81 poin, pada tahun 2013 yaitu 68,30 poin, pada tahun 2014 yaitu 68,81 poin, pada tahun 2015 yaitu 69,45 poin, dan pada tahun 2016 yaitu 70,00.

Dengan melihat angka IPM Provinsi Aceh, maka peran yang diemban pemerintah semakin penting karena pemerintah dituntut harus mampu melakukan fungsi alokasi atas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan fasilitas umum lainnya agar tercapai kesejahteraan sosial masyarakat yang menyangkut konsep pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manuis (IPM) merupakan suatu hal yang penting untuk mengukur tingkat kuliatas SDM dalam negeri. Salah satu

bagian yang menjadi tolak ukur IPM yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ini dikarenakan Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah atau suatu Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) biasanya digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu wilayah apakah dalam kondisi baik atau buruk. PDRB juga dapat melihat tingkat kesejahteraan manusia. Selain itu, PDRB juga bisa mengukur total pendapatan perkapita atau total pendapatan semua orang dalam perekonomian. Hal ini juga termasuk total belanja pemerintah dan masyarakat dalam membeli suatu barang atau jasa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan statistik perekonomian yang sangat diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran akhir yang terbaik dalam mengetahui kesejahteraan masyarakat. Sehingga, PDRB biasa digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dikarenakan PDRB dapat melihat total pendapatan dan pengeluaran masyarakat secara bersamaan.

Adapun beberapa manfaat perhitungan Pendapatan Nasional yang menjadikannya indikator makro ekonomi yang paling mudah untuk mengetahui perkembangan struktur perekonomian (Yuliadi, 2007) antara lain: a) mengetahui dan menelaah struktur dan susunan perekonomian, b) membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu, c) membandingkan perekonomian antar daerah, d) merumuskan kebijakan pemerintah.

Pembangunan sumber daya manusia juga harus didukung oleh faktor penunjang yang memumpuni, dalam hal ini ialah fasilitas umum. Fasilitas

umum atau Infrastruktur sama dengan prasarana yaitu segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Infrastruktur merupakan salah satu indikator utama dalam melihat kemajuan suatu wilayah. Fasilitas umum disuatu daerah sangat penting untuk menunjang kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat dimudahkan dan dapat menambah ukuran pembangunan manusia lebih meningkat yang dilihat dari Indeks pembangunan Manusia. Infrastruktur itu sendiri, di bagi menjadi dua bagian yaitu transportasi dan energi. Pada bagian transportasi, peningkatan infrastruktur dilihat dari peningkatan akses mobilitas masyarakat terkait kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktivitas hariannya. Sedangkan pada bagian energi infrastruktur berperan dalam memberikan tingkat kesejahteraan berupa pemerataan tingkat kelayakan hidup masyarakat. Hal ini dimaksud adanya pendistribusian energi berupa listrik serta pasokan air bersih. Berdasarkan penjelasan tersebut infrastruktur juga memiliki pengaruh dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan infrastruktur dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat berarti juga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang ada.

Di dalam Indeks Pembangunan Manusia, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan tersebut, berupa peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas dari sektor pendidikan itu sendiri. Peningkatan tersebut

harus diiringi dengan peningkatan anggaran pemerintah di sektor pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Anggaran Pemerintah di Sektor Pendidikan nantinya akan direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang bertema pendidikan, seperti pelatihan skill, seminar atau workshop, ataupun kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selanjutnya, realisasi anggaran juga dapat di peruntukkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai serta penambahan alat penunjang di bidang pendidikan lainnya. Dengan demikian, anggaran pemerintah dapat terealisasi dengan baik pada proses peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar meningkatnya kuantitas dan bermutu tinggi.

Alasan peneliti memilih seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh sebagai objek penelitian, karena IPM provinsi Aceh selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan tetapi angka tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di pulau Sumatera. Peneliti melihat tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya terutama di pulau Sumatera oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan serta menggambarkan kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh agar dapat memberikan gambaran serta panutan terhadap provinsi-provinsi lain terutama di Pulau Sumatera terkait dalam tingkat Indeks Pembangunan Manusia agar terciptanya Pembangunan Manusia yang merata di Pulau Sumatera. Peningkatan angka

Indeks Pembangunan Manusia merupakan fenomena menarik karena Indeks Pembangunan Manusia dapat menggambarkan pencapaian kinerja dalam mengembangkan sumber daya manusia yang handal untuk membangun perekonomian di suatu wilayah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul, “**ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2012 – 2016**”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Sehubungan dengan faktor keterbatasan yang ada dan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, maka penelitian hanya berfokus pada :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Aceh 2012-2016.
2. Variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2012-2016, Fasilitas Umum kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2012-2016, dan Belanja pemerintah di Bidang Pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.
3. Variabel ini menggunakan data panel di dua puluh tiga kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh tahun 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh Fasilitas Umum kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh tahun 2012-2016?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh tahun 2012-2016?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Fasilitas Umum kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu serta wawasan tentang hal yang diteliti sehingga mampu membandingkan antara teori yang diterima selama perkuliahan dan realita di lapangan.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai peranan produk domestik regional bruto, fasilitas umum, dan belanja pemerintah di bidang pendidikan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh tahun 2012-2016.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai bahan masukan dalam penentuan sebuah kebijakan Pemerintah Pusat terutama Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depannya.